

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

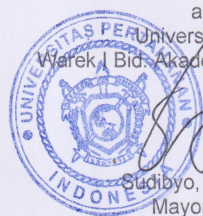
Kampus Utama
Jl. Sekeloa Timur No. 101
Bogor, 16115
20 November 2018

Nomor : B/3229 /XI/2018
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data

Bogor, 30 November 2018

Kepada
Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
di
Tangerang

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalendar Akademik Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan atas nama Bambang Prasajo Wicaksono, NIM: 120170203004, nomor HP: 087878238686, email: bambang.@mp.idu.ac.id/be.prasajo@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Potensi Pemanfaatan Kapal Illegal Fishing Yang Dirampas Negara Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nelayan Tradisional"
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.



a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek / Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Sudibyo, S.E., D.S.S., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek / Kasatwas Unhan
3. Bupati Kabupaten Tangerang
4. Ketua LPPM Unhan.

PANDUAN WAWANCARA



POTENSI PEMANFAATAN KAPAL *ILLEGAL FISHING* YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI NELAYAN TRADISIONAL (STUDI DESA TANJUNG PASIR, TANGERANG)

a. Informasi Umum

Yth Bapak/ Ibu/ Saudara/I Narasumber

Dengan Hormat, Dalam rangka penelitian Tesis Mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan). Peneliti memohon dan sangat mengharapkan Bapak/ Ibu/ Saudara/I berkenan menjawab pertanyaan peneliti diisi benar dengan sejujurnya. Terimakasih atas berkenannya dan partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/I Narasumber dalam menjawab pertanyaan yang ada di dalam naskah ini. Apabila terdapat keluhan, kritik, dan saran dapat menghubungi peneliti:

Nama : Bambang Prasojo Wicaksono

NPM : 120170023004

Fakultas : Manajemen Pertahanan

Program Studi : Ekonomi Pertahanan

Alamat : Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC, Sentul,
Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810

No. : 0878.7823.8686/ be.prasojo@gmail.com

Telpon/Email

Identitas Informan/ Narasumber

Nama :

Usia :

Alamat :

Status :

Pendidikan :

b. Deskripsi Penelitian

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat luar biasa jika dilihat dari potensi perikanan tangkap. Potensi ini membuka peluang bagi 40 juta lebih penduduk. Namun, potensi kelautan yang saat ini baru bisa dimanfaatkan hanya 9,2 persen. Indonesia secara geografis memiliki luas laut sebesar 5,8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta km², laut nusantara 2,3 juta km² dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km². Dari luas tersebut, 50 persen luas wilayah laut Indonesia merupakan daerah perairan pantai (DPP) yang memiliki potensi sangat penting karena sekitar 70 persen sumber daya ikan menghabiskan waktu hidupnya di DPP, dan 90 persen dari hasil biomassa laut berasal dari DPP.

Menyikapi hal tersebut, ada potensi produksi perikanan tangkap yang mampu dimanfaatkan oleh Indonesia jika dikelola secara serius dan benar. Dalam hal ini, untuk meningkatkan produksi perikanan laut (khususnya perikanan tangkap), maka dibutuhkan sarana produksi utama yakni, armada kapal tangkap yang sesuai dengan karakter perairan di Indonesia. Selain itu, program pengadaan armada laut tersebut juga tidak didukung dengan penguatan modal, kelembagaan ekonomi nelayan serta

sumberdaya manusia. Potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap ialah kapal *illegal fishing* yang tertangkap.

Maka daripada itu dibutuhkan suatu usaha yang lebih jika Pemerintah ingin mengurangi angka kemiskinan nelayan. Tidak hanya mengejar faktor produksi perikanan, tapi Pemerintah harus mampu menciptakan sistem kelembagaan ekonomi yang berkeadilan. Sistem kelembagaan ekonomi yang mampu menopang sisi produksi (peningkatan volume penangkapan ikan), distribusi, dan pembangunan manusianya (nelayan) dalam sistem yang berkeadilan. Rantai kemiskinan struktural pada nelayan harus dihadapi dengan rantai produksi yang terstruktur pula.

c. Panduan Wawancara

Williamson menjelaskan analisis sosial didasarkan pada 4 (empat) level. Level I berupa aturan informal yang telah melekat dalam masyarakat, seperti tradisi, agama, norma, adat, dan konvensi keterkandungan. Level II berupa lingkungan kelembagaan yang menekankan pada ekonomi kepemilikan yang terdiri dari aturan main, politik dan birokrasi yang meliputi eksekutif, legislatif, hukum, maupun birokrasi pemerintahan. Level III berupa struktur tata kelola yang menekankan kontrak dan biaya transaksi. Level IV berupa efisiensi sumberdaya dan struktur insentif berupa kerangka kerja tradisional.

Dari teori tersebut dan rumusan masalah yang disampaikan sebelumnya (pada bab I) peneliti menyampaikan pokok-pokok wawancara sebagai berikut:

Tabel Pertanyaan Penelitian Kepada Narasumber

N O	KOD E	VARIABE L	PERTANYAAN PENELITIAN
----------------	------------------	----------------------	------------------------------

1	A	Nelayan, pedagang dan asosiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pola kerja nelayan selama ini? (Baik itu produksi, distribusi ataupun konsumsi) • Apa yang dilakukan nelayan untuk pemenuhan kebutuhan modal? • Bagaimana pola kelembagaan ekonomi nelayan selama ini berjalan? • Bagaimana jika kapal <i>illegal fishing</i> diberikan kepada kelompok nelayan?
2	B	Kementerian dan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah kebijakan penenggelan kapal akan terus dilakukan? • Jika tidak, bagaimana strategi kementerian untuk pemanfaatan kapal tersebut? • Apa strategi yang dilakukan Pemerintah dan Pemda dalam menghadapi pasar perikanan secara nasional dan global? • Bagaimana Pemerintah dan Pemda membangun kelembagaan ekonomi masyarakat (nelayan) dalam menghadapi pasar global saat ini?
3.	C	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tanggapan Bapak/ibu mengenai kebijakan penenggelaman kapal? • Kebijakan seperti apa yang harus dilakukan terkait penenggelaman kapal? • Secara hukum, jika kapal dimanfaatkan untuk produktifitas nasional seperti apa? • Kelembagaan ekonomi seperti apa yang harus dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan?

Keterangan:

No	Jabatan	Instansi	Kode
1	Kepala Desa	Pemerintah Desa Tanjung Pasir	A
3	Nelayan	Nelayan Desa Tanjung Pasir	B
4	Akademisi	LIPI, IPB, dan Universitas Pertahanan	C

TRANSKRIP WAWANCARA



**POTENSI PEMANFAATAN KAPAL *ILLEGAL FISHING* YANG
DIRAMPAS OLEH NEGARA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN
EKONOMI NELAYAN TRADISIONAL
(STUDI DESA TANJUNG PASIR, TANGERANG)**

Nama	:	Bambang Prasajo Wicaksono
NIM	:	120170203004
Fakultas	:	Manajemen Pertahanan
Program Studi	:	Ekonomi Pertahanan
Alamat	:	Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC, Sentul, Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810
Kode Instrumen	:	

Identitas Informan/ Narasumber

Narasumber	:	Muchammad Nadjib
Jabatan	:	Peneliti Senior Pusat Penelitian Ekonomi
Instansi	:	LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Kode Instrumen	:	C1
Lokus Penelitian	:	Akademisi

Tabel Pertanyaan Penelitian Kepada Narasumber

NO	VARIABEL	PERTANYAAN & JAWABAN PENELITIAN
1	Kebijakan perikanan	<p>Bagaimana tanggapan Bapak jika kapal <i>illegal fishing</i> diberikan untuk nelayan kecil ataupun perusahaan ikan nasional?</p> <p>Kebijakan itu sebenarnya bagus, tapi masih belum waktunya nelayan itu untuk memanfaatkan itu secara optimal. Nelayan pada umumnya banyak memiliki kendala. Umumnya, nelayan kita adalah nelayan kecil. Mereka itu, memiliki tingkat pendidikan rendah. Terbanyak di pesisir pulau Jawa, yang mengakibatkan <i>overfishing</i>.</p> <p>Kapal-kapal <i>illegal fishing</i> memiliki teknologi canggih, dan pada umumnya belum familiar dengan nelayan lokal. Umumnya. Banyak kasus-kasus yang dulu terjadi seperti kasus kapal 30 GT dari pemerintah justru salah sasaran. Tujuannya kepada nelayan kecil, permasalahan yang dihadapi nelayan kecil adalah hambatan modal, SDM (sumberdaya manusia), teknologi. Sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan teknologi yang lebih <i>advand</i>. Apalagi kebijakan yang dibuat harus memperhatikan faktor-faktor alam yang ada dilingkungan sekitar. Faktor-faktor alam ini adalah bagaimana mampu di sentra nelayan Jawa atau Sulawesi. Jika operasinya di pasific, atau di luar ZEE itu memang belum nelayan kita belum mampu untuk menjangkau itu.</p> <p>Kalau nelayan kita memahami teknologi tangkapan di lepas pantai, karakteristik ikan yang akan ditangkap, karakteristik lingkungan, selain itu juga nelayan menghadapi kendala lain, yakni kendala modal. Kalau nelayan kecil itu mengoperasionalkan kapal-kapal sangat tidak mungkin karena butuh modal yang besar. Contoh kapal 30 GT, yang banyak mengoperasikan justru nelayan-nelayan kaya. Sehingga tujuannya tidak capai, karena ketidakmampuan operasional. Karena keterbatasan modal dan teknologi, mau tidak mau harus diberikan kepada nelayan yang sudah besar. Ini</p>

		<p>yang menjadikan kebijakan tersebut akan salah sasaran. Apalagi kebanyakan teknologi yang digunakan oleh kapal-kapal <i>illegal fishing</i> yang berukuran besar itu sudah ada yang langsung produksi dalam pengertian pengalengan. Itu sangat membutuhkan <i>effort</i> kualitas sumberdaya dan itu yang mampu adalah lulusan perikanan. Kalau nelayan umum belum mampu menurut saya.</p> <p>Kalau itu diterapkan akan mengalami salah sasaran, kemudian akan menghadapi masalah yang sama. Kalau kasus seperti di lelang, setelah keputusan pengadilan akan kembali kepada pemilik aslinya dengan menggunakan tangan oranglain. Itu akan menjadi masalah lain. Kalau di hibahkan, masyarakat akan belum mampu. Karena nelayan kecil tidak mampu secara teknologi. Belum banyak nelayan kita yang mampu beroperasi di lepas pantai.</p> <p>Kalau target perikanan mau kearah pelagis, maka ruang produksi yang harus diambil adalah di atas 15 mil dari garis pantai.</p> <p>Itu bisa secara teori. Tapi kita harus melihat bahwa nelayan kita itu tidak mandiri dalam permodalan. Mereka tidak mandiri karena melaut dimodali oleh tengkulak, rentenir, bukan bank. Jaring rusak dimodali oleh mereka, sektor modal informal yang bermain. Bukan perbankan kita. Nelayan lepas susah dari jerat itu, kalau itu diberikan kepada nelayan, jelas mereka tergantung kepada patronnya. Berbeda jika kapal itu diberikan kepada patronnya, itu masih bisa tapi akan menghadapi masalah eksploitasi nelayan lagi. Jadi bagaimana ada semacam aturan dalam bagi hasil yang memihak kepada nelayan, sekarang bagi hasilnya berpihak pada pemilik modal. Bagi hasil yang biasa berlangsung pada nelayan adalah 50-50, dimana pembagiannya sangat merugikan nelayan. Karena tidak memiliki akses terhadap sistem penjualan. 50 persennya itu mutlak 1 untuk pemilik</p> <p>Saya pernah menghitung itu dalam penelitian di Juwana pada kapal pursein. <i>Raman kotor</i></p>
--	--	---

	<p>(pendapatan umum yang belum dikurangi macam-macam yang diterima nelayan dalam satu trip/perjalanan) kemudian dikurangi biaya lelang dan biaya logistik baru itu dapat <i>raman bersih</i>. Itu dikurangi cadangan perbaikan kapal 30 persen, baru hasilnya dibagi dua. Artinya pemilik kapal mendapatkan 50% plus 30%, walaupun teorinya dia mendapatkan 50%. Padahal naik dok itu 2-3 kali dalam 1 tahun. Sedangkan ABK 50% hanya mendapatkan 50% setelah dipotong 30%.</p> <p>Jadi nelayan itu gengsinya rendah, itu kenapa anak-anak muda tidak mau terjun kesitu. Kalau tingkat pendidikan yang lumayan, dia memiliki suatu inovasi yang menguntungkan dia. Tingkat pendidikan yang menengah, akan memiliki pemikiran yang membangun usahanya. Kebanyakan nelayan kita basis pendidikannya formal rendah, oke kemudian mereka menjadi trampil. Tapi susah untuk membuat terobosan yang efisien.</p> <p>Memang sangat menarik kapal <i>illegal</i> itu menjadi kapal induk, tapi memang harus beres adalah masalah kepemilikannya. Itu hasil tangkapan dari kapal <i>illegal</i>, apakah sudah memalui peradilan. Dan siapa yang akan mengelola itu, kalau konsorsium mungkin juga.</p> <p>Kalau diberikan ke nelayan, ataupun kelompok nelayan. Ada masalah budaya dan patron.</p> <p>(pengalaman saya mengelola kapal 30 GT di Jogja, membangun koperasi gagal. Karena telah mengganggu sistem ekonomi yang sudah berlangsung. Kapal <i>illegal fishing</i> ini akan menjadi milik negara, tapi tetap dikelola dengan oleh nelayan dengan bantuan nelayan.)</p> <p>Nelayan itu lebih patuh pada patronnya, karena akan mempengaruhi hidupnya. Itu yang dimiliki patron, dan yang tidak mampu negara atau perbankan masuki. Mereka harus pasrah dan patuh terhadap patronnya, ini yang harus ada terobosan. Tapi gini, kita pernah uji coba sistem bagi hasil dari</p>
--	---

	<p>kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama tidak semua daerah nelayan ada, kami ke Tuban yang berdekatan dgn rembang dan lamongan. Bulu, sarang lebih sejahtera daripada palang. Sama-sama pantura dan karakteristik lautnya. Kita melakukan penelitian disitu, akhirnya kita temukan fakta. Bahwa sistem pemilikan asset di palang itu dimiliki juragan, di Bulu dengan sistem kepemilikan bersama. Dan di daerah Bulu, bagi hasilnya sama 50-50, tapi dibagi jumlah pemilik. Kalau pemilik ikut melaut, dia akan mendapatkan hasil juga sebagai ABK. Mendapatkan pendapatan dari pemilik dan ABK. Waktu itu modal dari patungan modal, dan dengan sistem itu terjadi pembagian resiko. Tapi hasilnya mereka menikmati juga. Sistem sharing capital, ternyata bisa lebih mensejahterakan daripada sistem kepemilikan individu. Pada krisis ekonomi, kita menerapkan itu dengan dana 25 juta. 1-2 GT, mesinnya pun dapat dari Bupati Tuban. Dulu kita terapkan di daerah Kradenan, di kota Tuban. Fishing groundnya di tepi untuk mendapatkan teri nasi. Dan terus terang cara ini gagal, bukan karena sistem tapi karena <i>fishing ground</i>-nya telah <i>over fishing</i>. Kemudian kita mendapatkan program yang bisa untuk membeli kapal 30 GT. Kami kemudian geser ke Lamongan daerah Blimbing. <i>Fishing ground</i>-nya sampai lepas pantai, sampai Masalembo, sistem yang kami bangun kelebagaannya. Kami intervensi kapal beserta peralatannya, kami sebagai pemilik kapal. Dengan catatan hasilnya akan kita gulirkan ke masyarakat. ABK juga bagian dari pemilik kapal ini. Dan berkembang dan bergulir, selain mendapatkan bagian sebagai ABK juga sebagai pemilik kapal. Yang kita ambil adalah nelayan mudah, miskin dan memiliki kemampuan serta kemauan. Dalam 6 (enam) bulan sudah dapat kita lihat hasilnya.</p> <p>Dulu yang mengelola langsung Pak Masyhuri, dalam perkembangannya 2 kapal rusak dan tenggelam. Tapi embrionya, ABK ini sudah memiliki kapal sendiri. Dengan sistem <i>share</i> ini bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan berkembang menjadi 6 (enam) kapal, dan yang kita</p>
--	--

		<p>bangun sistem kelembagaannya. Kepemilikan bersama mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan mereka menjadi pemilik, <i>bargaining position</i> sama. Mereka mampu menentukan harga pasar sendiri. Tangkapan dikuasai oleh ABK, yang dipimpin oleh Nahkoda. Tidak seperti yang terjadi pada sistem lain dimana pemilik kapal menentukan proses atau transaksi jual beli. Ternyata sistem penjualan yang dimiliki oleh pemilik kapal, yang menentukan harga ikan justru jaringan yang sudah dimiliki oleh pemilik kapal, sehingga harga sudah ditentukan.</p> <p>Kebijakan industri perikanan dalam lingkup nasional itu ada atau tidak Pak?</p> <p>Sebenarnya itu sudah ada, tapi memang kebijakan perikanan atau pembangunan nelayan kita itu berbasiskan pada pola kebijakan darat.</p>
2	<p>Model Kelembagaan Ekonomi</p>	<p>Kelembagaan ekonomi seperti apa yang mampu mendorong produksi perikanan nasional ataupun nelayan sendiri?</p> <p>Kelembagaan ekonomi nelayan jika melihat latarbelakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka kelembagaan ekonomi nelayan harus didukung pemerintah dari segi penguatan modal usaha. Disamping peningkatan kapasitas manusia-nya. Jadi dalam peningkatan kelembagaan harus dibangun sistem berbagi kepemilikan dengan sistem pembagian hasil yang adil. Selain itu, perbankan nasional harus bisa masuk dalam sistem perikanan tangkap.</p> <p>Bank itukan, skemanya adalah sama dengan skema petani. Berdasarkan bunga, nelayan kan sifatnya pendapatannya tidak pasti. Dengan diterapkannya bunga yang fix, nelayan tidak akan bisa. Nelayan kadang bisa mendapatkan hasil besar, tapi kadang juga hasil kecil. Fluktuasi nelayan sangat tinggi, dan bank butuh suatu kepastian atas investasi yang dia tanamkan.</p> <p>Resiko, agunan (kapal tidak bisa dijadikan agunan, karena standartnya belum ada. Kapal kayu buatan</p>

		<p>juwana dan lamongan berbeda. Yang satu kayu jati, yang satu kayu kalimantan. Tidak ada patokan standart industri perkapalan pada perbankan. Kalau misalkan motor, honda bebek tahun 2010 yang ada di juwana dan kalimantan kemungkinan sama. Kalau kapal dengan bobot yang sama, belum tentu sama harganya karena bahan bakunya. Dan tingkat kerusakan pun harus diperhitungkan) aset terbesar nelayan itu pada kapal yang memiliki harga sangat besar. Di juwana kapal 30 GT yang menggunakan fasilitas <i>freezer</i>, bukan <i>coolbox</i> itu sudah di atas Rp 3 M. Padahal bentuknya itu kecil, tapi alat tangkap dan teknologi yang didalamnya itu menjadikan mahal. Nelayan itu padat modal, aset paling tinggi yang dimiliki tidak bisa diagunkan. Nelayan yang bisa berkembang adalah nelayan yang memiliki aset lain yang bisa diagunkan misalkan tanah. Kalau tidak, dia akan tergantung pada pemberi dana informal. Jadi bank, pendapatan yang tidak pasti itu. Musim timur dapat, musim barat tidak, menyebabkan bank menerapkan kriteria nelayan tidak bisa dipercaya. Disamping itu ada budaya nelayan yang memiliki budaya foya-foya tinggi. Kelompok nelayan ikan kecil akan banyak di <i>black list</i>, tapi nelayan di atas 30 GT, memiliki <i>back up</i> lain. Semisal di Bendar, mereka memiliki <i>freezer</i> yang bisa meminimalisir kerusakan ikan sampai 0% dibandingkan <i>coolbox</i> yang memiliki tingkat kerusakan 25% jika semakin lama disimpan.</p> <p>Mereka tidak memahami bagaimana pola-pola sosial budaya nelayan, mereka tidak memiliki ahli itu, hanya memiliki ahli keuangan saja. Harus ada bank yang memahami karakter lokalitas. Tidak seluruh bank menerapkan kebijakan makro, karakteristik nelayan di juwana pada dasarnya angin barat angin timur. Tapi di Bagansiapiapi, berdasarkan arus laut. Harus ada karakter lokalitas dlm perbankan, tidak bisa disamakan misalkan alat tangkap pelagis atau demersal. Jadi nelayan memiliki karakteristik tidak hanya pada besar kecilnya kapal, sosial budaya yang dihadapi, cuaca dan cara menangkap ikan, tapi juga terletak pada alat tangkap atau teknologi yang digunakan. Sejak</p>
--	--	---

		<p>adanya kredit Bimas yang diberikan kepada nelayan tahun 1980-an, angka kegagalan pengembalian nelayan sangat tinggi. Sejak saat itu, bank takut memberikan pinjaman kepada nelayan. Secara statistik, pemberian pinjaman yang banyak diberikan kepada nelayan budidaya, bukan perikanan tangkap. Terus ada sistematika yang mengikuti tradisi dan budaya nelayan, skema pinjaman yang mengikuti skema ketidakpastian di nelayan. Bank menerapkan <i>fix cost</i> yang tidak bisa diterima oleh nelayan. Pertanyaannya, kenapa lembaga keuangan non-formal (renternir) mampu memberikan pinjaman tersebut? Karena renternir mengikuti pola nelayan dihari itu, dia hari ini dapat sekian tinggal dipotong 10%, karena hanya di lokal itu. Dan bank tidak bisa menerapkan model seperti itu. Budaya ekonominya nelayan yang harus diperbaiki.</p> <p>Saya punya hasil studi tentang model, walaupun belum kita publikasikan. Saya membagi nelayan menjadi 3 kategori:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pre-bankable : umumnya nelayan <5GT. Bank tidak mungkin masuk dalam kelas atau kategori ini. Nelayan ini hanya bisa mengambil ikan di <4 mil, solusinya nelayan dalam kategori ini hanya dengan bantuan dari pemerintah atau berbentuk charity. Sambil dilatih untuk meningkatkan kemampuannya, diharapkan dia sampai ke kategori berikutnya dengan meningkatkan asetnya. Kalau dia sudah memiliki aset yang diagunkan, kita kategorikan bankable.2. Bankable: di atas 5 GT, dengan daerah tangkapan yang subur. Nelayan bisa di atas itu kalau mereka juga mampu memilah tangkapan semisal ikan karang yang memiliki kualitas tangkapan bagus akan memiliki harga yang bagus. Bank yang bergerak dlm kategori ini memiliki agunan. Nelayan di Bendar tidak butuh bank, justru bank yang merengek-rengok ke mereka. Karena mereka sudah dikategorikan dlm industri, dan itu bisa kita kategorikan dalam
--	--	--

post bankable.

3. Post-bankable: artinya nelayan yang memiliki kapal di atas 30 GT, daerah tangkapan di atas 15 mil, serta memiliki aset yang bisa diagunkan kepada bank. Seperti nelayan di Bendar bisa kita kategorikan di dalam ini. Seperti nelayan Bendar, dalam kurun waktu satu tahun, mereka mampu membangun 2-3 kapal dari hasil untuk yang mereka peroleh selama satu tahun tersebut.

Berdasarkan pengalaman Bapak bagaimana kelembagaan ekonomi nelayan di Negara tetangga? Mengingat kita tidak memiliki bentuk kelembagaan ekonomi nelayan pada level nasional. Sedangkan negara-negara lain menganut sistem pasar yang sudah mapan.

Di perbatasan Sulawesi Utara, ada General Santos perusahaan di Filipina. Salah satu produsen perikanan tangkap terbesar di Asia Tenggara. Pengelolaan di GS itu ikan tuna, padahal populasi tuna ada di lokasi kita. Armada mereka yang semut (pamboot) itu masuk sampai Sulawesi Selatan. Mereka mengembangkan armada semut (industri), apalagi Filipina secara kulture sama dengan orang Sangir. Mereka mengembangkan teknologi pumboot, itu mengalahkan teknologi masyarakat Sangir. Mereka bisa mengembangkan alat tangkap yang murah, dibuat dari multiplak (triplek) dengan rangka-rangka dan dilapisi dengan fiber. Membuatnya cepat, mudah, dan murah. Saudara-saudara kita di Sulawesi, akhirnya mengadopsi pumboot. Tapi tidak diikuti dengan adopsi kelembagaan ekonominya, kalau Filipina ada keterkaitan dengan perusahaan induk, GS. Dalam satu penangkapan, katakanlah 10 orang ABK. Mereka yang mendapatkan dari hasil tangkapan itu, dia mendapatkan bagian 25% dari tuna tangkapan itu. Ada sistem industri, di Sangir bagi hasil yang ditetapkan secara pemerataan. Seluruh hasil tangkapan dikumpulkan dan dijual, hasilnya dibagi rata kecuali nahkoda. Di Filipina, sistemnya berbeda. Hasil tangkapan di perhitungkan dari

	<p>masing-masing ABK yang bekerja. Sistemnya memang longline, masing-masing nelayan memancing sendiri. Nelayan itu (pomboot) memiliki sekoci (pakura), yang menyeter di pamboot itu. Yang merupakan bagian dari sistem pasar tersebut. Artinya dia menginduk pada satu teknologi yang membutuhkan kedisiplinan, produktifitas, dan kualitas per individu. Berbeda dengan nelayan Sangir, yang kegiatan utamanya atau budayanya petani. Sedangkan nelayan Filipina memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di tengah laut dalam waktu yang lama. Berbeda dengan nelayan kita (Sulawesi) yang tidak tahan berlama-lama di laut.</p> <p>Intervensi dari GS sangat masih di Sulawesi Selatan, kebijakan KKP yang menangkap ikan di Indonesia. Artinya ada aturan yang boleh menangkap ikan tapi harus ada kerjasama dgn perusahaan di Indonesia. ZEE yang boleh melakukan penangkapan ikan itu orang Indonesia. Diperketatnya peraturan, hasil produksi GS menjadi turun drastis. Ada penurunan hingga 11,47 ton, setelah kebijakan itu dilakukan.</p> <p>Itu kawasan industri yang berpusat di GS. Ikan yang dibeli oleh GS dari orang Indonesia harganya lebih bagus dari Indonesia. Armada-armada Filipina juga melepaskan pamboot hingga kepedalaman kita.</p> <p>Mereka bermanuver di selat malaka, di wilayah malaysia tapi jaringnya di kawasan Indonesia.</p> <p>Kita memang tidak memiliki kelembagaan ekonomi nelayan ataupun kepastian hukum yang kuat dalam perlindungan nelayan. Terutama diplomasi politik ekonomi dalam lingkup nelayan. Misalkan di Filipina, nota diplomatik tahun 2006, tapi sering dilanggar sama industri perikanan. Dan kita cenderung tidak bisa apa-apa.</p> <p>Bagaimana Model Kelembagaan Ekonomi yang sesuai untuk nelayan saat ini?</p> <p>Dilapangan pada umumnya nelayan dikuasai oleh bukan nelayan, tapi lebih pedagang ikan. Harusnya</p>
--	---

	<p>sektor penangkap dengan pedagang bisa terjalin, karena mereka memiliki kepentingan ekonomi masing-masing. Sehingga nelayan teralienasi secara ekonomi di lingkungan mereka sendiri. Selama penelitian saya, hanya di Karang Asem Indramayu yang koperasi nelayannya dikuasai oleh nelayan sendiri. Karena mereka mampu bersaing dengan sistem perdagangan yang dikuasai pedagang. Koperasi tersebut, memiliki aset yang besar dan juga mampu memperluas usahanya. Hingga mereka mampu mengalokasikan ratusan juta perbulan untuk memperdalam aliran sungainya. Koperasi itu koperasi pemilik kapal dan nelayan, sehingga ABK juga mampu sejahtera. Tambak udang pun memiliki koperasi sendiri.</p> <p>Jadi koperasinya monopsoni, anggotanya homogen. Sehingga dia mampu berhadapan dengan pedagang. Bagi hasilnya tetap sama, 50-50. Tapi harga yang dijual adalah harga pasar, sehingga ABK juga mendapatkan harga cukup baik. Hingga mereka juga mampu mengembangkan dan mengelola TPI dalam peningkatan teknologi. Aset lain yang dimiliki adalah bisnis perumahan.</p> <p>Usaha apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengintervensi kelembagaan ekonomi nelayan?</p> <p>Harus holistik, karena tidak mungkin hanya diselesaikan dari satu sisi semata. Sistem usaha perikanan sangat terkait dengan masalah nelayannya, keahlian/ pengetahuan mereka, alat tangkapnya/kapal, bahan baku atau logistik, ekosistemnya. Salah satu hal ini tidak berjalan, maka yang dirugikan adalah tetap nelayan. Harus ada usaha integratif dan koordinatif, kebijakan pemerintah kebanyakan parsial. Misalkan hanya memberikan jaring saja, tapi tidak memikirkan kelembagaannya, modalnya, dll. Kesemuanya harus secara sinergi dilakukan pembenahan.</p> <p>Dari sisi produksi, infrastruktur lemah. Eksploitasi yang terjadi hanya di pantai sebagian besar, lepas pantai masih sangat minim. Fasilitas pendukung di</p>
--	---

		<p>pelabuhan.</p> <p>Infrastruktur pemasaran masih belum, harusnya kita punya rantai dingin. Infrastruktur pasca tangkap. Sdm masih terbatas, dan umumnya keahlian hanya sebatas pesisir.</p> <p>Sosial ekonominya lemah, karena organisasi ekonomi banyak dikuasai oleh orang-orang darat.</p>
--	--	---

TRANSKRIP WAWANCARA



POTENSI PEMANFAATAN KAPAL *ILLEGAL FISHING* YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI NELAYAN TRADISIONAL (STUDI DESA TANJUNG PASIR, TANGERANG)

Nama : Bambang Prasojo Wicaksono
NIM : 120170203004
Fakultas : Manajemen Pertahanan
Program Studi : Ekonomi Pertahanan
Alamat : Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC, Sentul,
Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810
Kode Instrumen :

Identitas Informan/ Narasumber

Narasumber : Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Instansi : Institut Pertanian Bogor
Kode Instrumen : C2
Lokus Penelitian : Akademisi

Tabel Pertanyaan Penelitian Kepada Narasumber

NO	VARIABEL	PERTANYAAN & JAWABAN PENELITIAN
1	Kebijakan perikanan	<p>Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan perikanan tangkap nasional saat ini?</p> <p>Aku mulai dari, ini persis yang saya sampaikan dengan presiden 3 (tiga) bulan yang lalu. Saya punya konsep 4 (empat) R (potensinya).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Resource owner</i>. Negara perikanan seperti indonesia harus berdaulat secara sumberdaya, sehingga sudah betul kita menjaga sumberdaya kita dari proses illegal fishing. Sudah betul kita membuat peraturan untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara terhadap sumberdaya perikanan. Saya akui, saya kasih nilai 100 buat kebijakan Ibu Susi terkait penenggelaman kapal. Tapi ada 3 R yang lain. 2. <i>Resource produser</i>. Buat apa kita punya tapi hanya melihat sumberdaya yang melimpah tersebut. Kita berbangga bisa memiliki, tapi juga harus mampu memanfaatkan sumberdaya perikanan. Siapa itu? Ya kita, baik itu nelayan kecil ataupun nelayan industri. Bisa dimulai dari nelayan kecil dan berkolaborasi dengan nelayan besar. Kita harus tahu kapan menangkap perikanan di wilayah kita. Pada kacamata saya, ini yang tidak digunakan atau dilakukan oleh Ibu Susi. Artinya kita saat ini Cuma menjaga, tidak berproduksi. 3. <i>Resource prosesor</i>. Setelah di produksi, dimanfaatkan, tapi hanya mentah dan tidak memiliki nilai tambah. Low economics fishing,

		<p>maka perlu R ketiga, industri makanan, ikan kaleng hingga non-food. Ekstraksi sumberdaya laut untuk kebutuhan pengobatan. Industri itu tidak bisa diartikan selalu merusak, small skill saja bisa merusak. Industri juga bisa menjadi industri yang menjaga lingkungan.</p> <p>4. <i>Resource consumer</i>. Lebih pada bagaimana menikmati produksi kita, oke liberalisme market jangan sampai terjadi. Seperti level A perikanan tidak bisa dibeli oleh masyarakat kita. Oke kita mengejar nilai ekspor, tapi juga jangan sampai melupakan menciptakan pola pikir masyarakat untuk peduli pada konsumsi protein dari sumberdaya perikanan tangkap kita. Pola kehidupan atau gaya hidup ini yang harus dirubah, tidak hanya untuk golongan menengah ke atas, tapi juga golongan bawah.</p> <p>Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan penenggelaman kapal <i>illegal fishing</i>?</p> <p>Untuk kebijakan saat ini, saya melihatnya Ibu Susi bagus di R yang pertama, tapi melupakan ketiga R yang lain. Maka akhirnya, penilaian saya menjadi minus.</p> <p>Coba kita hitung stok perikanan kita dikalikan 10.000, di R pertama. Berapa industri penangkapan, multi player effect kan? Mari small skill hingga large skill. R 3, kalau setiap WTP memiliki ... nanti potensial nilai ekonomi. Untuk R 4 coba, meningkatkan konsumsi dalam negeri dan meningkatkan nilai ekspor.</p> <p>Perikanan harus satu sistem pemikiran dari teori</p>
--	--	--

		<p>pemikiran 4 (empat) R, dan ini diakui melalui Kepres Industri Perikanan 17 tahun 2016 juga dari konsep-konsep itu. Kombinasi <i>small skill</i> dan <i>large skill</i> harus bisa dilakukan. Pakai punya sendiri saja bisa untuk mendorong industri perikanan kita. Katakanlah mengikuti permen 56 itu, semua perikanan yang ditangkap di Indonesia harus buatan Indonesia bisa dilaksanakan, sudah selesai itu.</p> <p>Pertanyaanmu itu, kalau sekarang ngomong kebijakan Ibu menteri tidak suka <i>large skill</i>, hanya suka <i>small skill</i>. Bu Menteri punya pendapat, bahwa ikan itu hulunya ada di <i>high seas</i>. Dia bilang ikan akan mengalir dari <i>high seas</i> ke <i>costal seas</i> (pesisir), sehingga <i>high seas</i> di stop maka ikan akan mengalir dan besar di pesisir. Dia menyebutnya sebagai <i>mother filling</i>. Maka yang menangkap ikan besar akan nelayan kecil, 10 GT sudah bisa. Ada benar dan salahnya, kalau tuna itu tidak mungkin bisa. Bukan di stop di <i>high seas</i>, tapi diatur. Siapa yang mengatur? Ya itu perannya negara yang mengatur.</p> <p>Yang <i>high seas</i>, ya harus patuh terhadap peraturan negara. Ibu menteri tidak suka dengan <i>large skill</i>, itu masalahnya. Kalau dimanfaatkan untuk nelayan itu benar bisa bermanfaat, tapi tidak akan dilakukan dengan alasan tersebut.</p> <p>Kebijakan industri perikanan dalam lingkup nasional itu ada atau tidak Pak?</p>
--	--	---

		lya ada, tapi belum nyambung dengan konsep 4 R.
2	Model Kelembagaan Ekonomi	<p>Kelembagaan ekonomi seperti apa yang mampu mendorong produksi perikanan nasional ataupun nelayan sendiri?</p> <p>Kunci dari itu semua adalah kelembagaan ekonomi, harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun kelembagaan mereka sendiri, bukan sebagai objek (objek pemberian asuransi, dan pemberian kapal beserta alat tangkapnya) nelayan menjadi subjek pembangunan. Harus diberikan kemandirian, tapi dengan syarat keberlanjutan ekonominya. Nelayan harus berkelompok.</p> <p>Harus ada kelompok yang berlaku sebagai, kalau dulu ada rentenir. Mereka adalah <i>the last resource</i> nelayan dalam hal permodalan, ketika mereka di tinggalkan bank, tapi masalahnya mereka menyedot ekonomi nelayan. Tidak ada keterbukaan, dan uangnya masuk pribadi. Kalau konsep rentenir membantu memang benar. Di sumatra utara, saya buat semacam rentenir (tangkahan). Setiap pangkalan ikan ada kelompok rentenir, dia punya anggota. Uang ditentukan oleh rentenir, harga ikan juga. Tapi sebetulnya mereka membantu permodalan nelayan. Saya pernah buat sendiri, tapi yang buat kelompok dan punya anggota. Kita beri modal, harga pasar, dan mereka wajib mengangsur 5.000/hari. Uang itu masuk ke kelompok, dan digunakan untuk memperbaiki alat</p>

		<p>tangkap dan kapalnya sekalian.</p> <p>Kelembagaan ekonomi seperti apa? Kelembagaan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan didukung dengan teknologi modern. Misalkan aplikasi-aplikasi modern.</p> <p>Berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah pernah mengenyam pendidikan di Jepang. Menurut Bapak, bagaimana kelembagaan ekonomi nelayan di Jepang? Mengingat kita tidak memiliki bentuk kelembagaan ekonomi nelayan pada level nasional. Sedangkan negara-negara lain menganut sistem pasar yang sudah mapan.</p> <p>Kalau cocok kita ke arah Jepang, <i>coordinated</i>. Lebih kepada berkelompok dan memfasilitasi, rentenir lebih mengeksploitasi. Kalau di <i>scaling up</i> model tadi, seharusnya bisa.</p> <p>Di Jepang, model pembangunan koperasi berhasil karena mereka memiliki ruang perikanan. Misalkan wilayah ini dikelola koperasi, nelayan yang tidak masuk dalam kelompok tidak boleh menangkap ikan di wilayah tersebut. Makanya pola perikanan mereka berhasil dalam membentuk kelembagaan ekonominya. Polanya hampir sama dengan China, Korea, dan Taiwan juga. <i>Fishing Area</i> lah istilah kita, koperasi selalu berhubungan dengan wilayah pengelolaan mereka. Tanpa menjadi anggota koperasi, mereka tidak akan mampu menangkap ikan. Koperasi hanya 1-12 mil, di atas itu diatur oleh</p>
--	--	--

		<p>negara. Maka mereka membentuk koperasi khusus seperti alat tangkap, atau koperasi ikan tuna khusus untuk wilayah yang lebih luas tadi.</p> <p>Bagaimana Model Kelembagaan Ekonomi yang sesuai untuk nelayan saat ini?</p> <p>Yang dibutuhkan itu <i>environment</i> bisnis yang baik, bukan bantuan kapal, alat tangkap. <i>Environment</i> yang baik akan mampu mendorong nelayan mandiri. Saat ini nelayan dimiskinkan secara struktural, dikasih jaring kapal, tapi tidak dikasih modal. Dan mereka akhirnya kembali ke rentenir dalam menjalankan produksinya. Ya lingkaran kemiskinan ini terus berulang, walaupun telah dibantu alat tangkap. Tapi harus dibangun kelembagaan ekonominya, peningkatan kapasitasnya.</p> <p>Di Sumatra Utara, kami jadi rentenir. Bedanya mereka memeras nelayan, kita memfasilitasi mereka. Dan kelompok yang ada di bawah saya, mampu membeli alat produksinya mereka sendiri. Dan mereka berkembang terus hingga mampu membeli kapal sendiri. Pembagian hasil berdasarkan kepemilikan alat produksi yang dimiliki oleh kelompok itu. Dengan sistem <i>coordinated</i> dan <i>fasilitated economy</i>, kelompok yang berada di rentenir lain masuk ke tempat saya. Dan akhirnya, pola kerja kami ditiru mereka.</p> <p>Betul memang, kita tidak boleh merusak jaringan yang ada di masyarakat tapi beradaptasi dengan</p>
--	--	--

		<p>pola adaptasi ekonomi yang lebih <i>coordinated</i> dan <i>facilitated</i>. Kalau di Jepang memang sudah berbentuk koperasi besar, tapi kita bisa mulai dari kelompok-kelompok kecil tersebut, hingga mampu menjadi besar dan membentuk koperasi.</p>
--	--	--

TRANSKRIP WAWANCARA



POTENSI PEMANFAATAN KAPAL *ILLEGAL FISHING* YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI NELAYAN TRADISIONAL (STUDI DESA TANJUNG PASIR, TANGERANG)

Nama	:	Bambang Prasajo Wicaksono
NIM	:	120170203004
Fakultas	:	Manajemen Pertahanan
Program Studi	:	Ekonomi Pertahanan
Alamat	:	Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC, Sentul, Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810
Kode Instrumen	:	

Identitas Informan/ Narasumber

Narasumber	:	Dr. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD
Jabatan	:	Komandan Sekolah Komando dan Strategi Angkatan Laut
Instansi	:	Sekolah Komando dan Strategi Angkatan Laut
Kode Instrumen	:	C3
Lokus Penelitian	:	Akademisi

Tabel Pertanyaan Penelitian Kepada Narasumber

NO	VARIABEL	PERTANYAAN & JAWABAN PENELITIAN
1	Kebijakan Nasional	<p>Bagaimana Menurut Bapak mengenai kebijakan penenggelaman kapal <i>illegal fishing</i>?</p> <p>Memang disatu sisi untuk memberikan shocktherapy bisa saja. Tapi pada kenyataannya illegal fishing tidak berhenti. Apakah perampokan sudah berhenti? Pembunuhan, pemerkosaan dan kejahatan lainnya? Mau dihukum seperti apa, pelanggaran hukum itu bagian dari kehidupan manusia sendiri. Artinya kita perlu meminimalisir, bukan untuk menghilangkan 0% kejahatan. Untuk mengurangi, itu saja. Bagaimana caranya? Tidak selalu dengan kekerasan, misalnya kita lakukan pendekatan persuasif. Yang mengalami illegal fishing juga tidak Indonesia saja. Negara-negara lain pun mengalami itu, illegal fishing terjadi dinegara-negara kepulauan lainnya. Pertanyaannya, apakah kapal-kapal itu ditenggelamkan oleh negara lain? Di Myanmar justru angkatan lautnya dan perusahaan ikan nasionalnya dibangun berdasarkan kapal-kapal yang mereka tangkap. Jadi kalau dilihat dari penegakan hukum, KUHP masuk dalam penghilangan barang bukti.</p> <p>Misalkan Polisi, menangkap motor bodong, apakah dibakar? Kriteria pemusnahan hanya barang bukti itu jika tidak memiliki manfaat bagi manusia. Misalkan makanan kadaluarsa, miras oplosan, dll.</p> <p>Caranya tidak harus mahal, memusnahkan kapal ikan berat 300 ton, butuh berapa TNT? Berapa yang digaji untuk itu? Resiko? Satu kali penenggelaman kapal bisa Rp 200 juta, sekarang sudah berapa penenggelaman. Kalau dilihat banyak ruginya daripada untungnya. Kalau ikan sekarang memang makin banyak, tapi apakah itu diambil oleh nelayan kita semua.</p> <p>Kalau di Australia, mereka menenggelamkan tapi juga mengganti dengan uang ganti rugi. Seperti</p>

		<p>yang banyak dilakukan oleh orang NTT, justru mereka sering lakukan dengan sengaja. Setelah mereka dikarantina, mereka diberikan uang sebagai ganti rugi.</p>
<p>2</p>	<p>Kelembagaan Ekonomi</p>	<p>Menurut bapak, kelembagaan ekonomi seperti apa jika kapal-kapal itu digunakan untuk produksi nasional?</p> <p>Bisa tidak negara membuat perusahaan perikanan nasional? Semacam BUMN, yang diserahkan langsung pada kementerian BUMN. Sekarang KKP melakukan 3 (tiga) peran sekaligus, yakni: regulator, operator dan eksekutor.</p> <p>Tinggal panggil, lantik, visi misinya seperti apa? Biar fokus, sehingga berjalanlah perekonomian nasional di bidang perikanan.</p> <p>Semuanya era kepemimpinan selalu melakukan hal yang sama. Kurang cermat dalam mengelola potensi kelautan.</p> <p>Misalkan kalau kita lihat di negara lain memiliki sekolah, karena mereka ingin mendorong nelayan dari segi kualitasnya. Harus ada pengelolaan secara profesional, karena tenaga kerjanya saja tidak ada yang profesional.</p> <p>Kalau dilihat secara ketahanan nelayan, nelayan Thailand memiliki ketahanan di laut yang lebih lama. Dan mereka lebih betah di laut juga, selain itu mereka juga bisa menekan kebutuhan logistik. Sehingga kebutuhan pengeluaran untuk logistik akan semakin berkurang. Jadi nilai-nilai yang diantui oleh nelayan juga mempengaruhi. Misalkan pisah keluarga dengan waktu yang lama, mereka tidak bisa melakukan itu nelayan kita. Karena budaya yang mengekang nelayannya.</p> <p>Saya pernah mewawancarai nelayan luar yang tertangkap, sebagian besar mereka mampu berada di laut 3 (tiga) bulan.</p> <p>Kelembagaan ekonomi di negara lain seperti apa?</p>

		<p>Mereka sistemnya kontrak (negara lain), jadi mereka sudah terima gaji. Kita modelnya bagi hasil, yang menurut saya kurang menguntungkan.</p> <p>Harusnya negara mensupport dalam kredit bank, peningkatan kapasitas nelayan, kepastian hukum. Harus ada kemudahan pinjaman, negara lain seperti Thailand, Filipina, ataupun Vietnam, negara menekan perbankan untuk memberikan kredit khusus untuk nelayan.</p> <p>Pengalaman di Myanmar misalkan, kapal-kapal illegal fishing yang dirampas negara digunakan oleh angkatan laut untuk memperkuat armada militernya. Itu di awal-awal mereka membangun. Setelah itu, mereka menggunakan kapal-kapal untuk membangun ekonomi perikanan nasional.</p>
--	--	--

TRANSKRIP WAWANCARA



POTENSI PEMANFAATAN KAPAL *ILLEGAL FISHING* YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI NELAYAN TRADISIONAL (STUDI DESA TANJUNG PASIR, TANGERANG)

Nama : Bambang Prasojo Wicaksono
NIM : 120170203004
Fakultas : Manajemen Pertahanan
Program Studi : Ekonomi Pertahanan
Alamat : Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC, Sentul, Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810
Kode Instrumen :

Identitas Informan/ Narasumber

Narasumber : Supriyadi dan Darmaji
Jabatan : Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
Instansi : Desa Tanjung Pasir
Kode Instrumen : A1 dan B1
Lokus Penelitian : Nelayan

Tabel Pertanyaan Penelitian Kepada Narasumber

NO	VARIABEL	PERTANYAAN & JAWABAN PENELITIAN
1	Kebijakan perikanan	<p>Program pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan atau kesejahteraan nelayan ada tidak Pak?</p> <p>Sebenarnya justru, di sini tempatnya kalau memang mau memberdayakan masyarakat. Kan di sini rata-rata, kan 80 persen nelayan, yang penghasilannya kan tidak menentu. Apalagi kalau lagi angin kencang. Untungnya, ibu-ibunya difasilitasi mencari nafkah di sini. Cuma Pak, apakah tiap hari jualan itu laku, soalnya kan yang rame hari Sabtu Minggu aja. Kalau hari-hari biasa ya paling satu dua. Sepi kayak begini aja.</p> <p>Kalau program TNI AL di sini kadang-kadang ada baksos ya. Pengobatan gratis. Gak menentu sih. Karena dia mungkin kan, kadang-kadang di daerah mana gitu. Pindah-pindah mungkin wilayahnya.</p> <p>Dulu kan ada program SIKIB itu ada 5 pilar, dibikin ada rumah pintar, untuk pemberdayaan masyarakat agar belajar di situ. Sebenarnya ada pinjaman KUR segala. KUR, Kredit Usaha Rakyat. BRI programnya. Dari masyarakat sendiri di sini yang akhirnya salah paham. Jadi mereka buka kantor di sini, eh buka mobil, pakai mobil Supaya masyarakat sini minjemnya ke BRI.</p>

		<p>Agunannya pun Cuma KTP, KK.</p> <p>Orang yang gak punya jaminan bisa pinjem, yang penting ada usahanya kelihatan. Coba waktu itu tim survey-nya itu karena programnya terburu-buru saat Pak SBY datang ke sini, akhirnya asal-asalan. Harusnya ada pembinaan lah dari Pemda. Dijelaskan kalau KUR ini cara pinjemnya begini cara pemulangannya begini, nanti sampai sebesar apa, dan sasarannya kepada siapa gitu. Cuma dulu paling kecil 5 juta, bahkan sampai 30 juta. Ternyata, pada saat programnya itu turun, yang ngambil itu cuma coba-coba. Gak tau, taunya dapat duit, kasi KTP, KK dapat duit. Tapi bayarnya, gak ada yang mau bayar. Akhirnya kan tanggung jawabnya BRI. Udah, programnya jadi kacau. Karena itulah, pembinaannya kurang, kurang sosialisasi pada saat itu. Justru saya juga malah yang sebagai ketua RT malah gak tau. Tau-tau ada yang datang ambil pinjaman Pak. Kok ada orang yang datang ke saya. Apa mungkin ini terburu-buru atau lewat siapa? Saya juga gak tau pada saat itu. Taunya pada saat Pak SBY datang, orang BRI ngumpulin RT, RW semua masalah program KUR, ini gak jalan. Pak SBY itu negor, KUR nya gimana? Mau gak mau kan itu tanggung jawabnya BRI. BRI gak mau, uangnya kebobolan terus.</p> <p>Ada juga dari koperasi, apa itu, Ganesha, itukan Koperasi Ganesha, itu kan, bukannya program pemerintah. Dia mencari keuntungan pribadi kan, tapi dia bisa jalan. Kenapa, kok pemerintah sendiri</p>
--	--	--

		<p>gak bisa. Kendala yang saya lihat, itu karena sistem program di lapangnya itu kurang pas.</p> <p>Itu kalau menurut saya udah pasti ada. Kekecewaan terhadap pemerintah. Kadang-kadang di sini juga kalau ada pemilihan, ah ngapain milih, toh kalau udah kepilih juga dia aja yang ngejalanin, sama kita juga gak kenal, gak perhatian sama kita,ada banyak yang seperti itu.</p> <p>Program dari pemerintah daerah apa Pak, dari DKP?</p> <p>kadang-kadang di pelelangan suka ada pembinaan. Ya seperti, ada bantuan juga, Cuma gak banyak bantuannya.</p> <p>Kalau Pemda itu biasanya turun ke kelurahan dulu Pak, terus kita dikasi pengarahan, terus mangrove. Bantuan dari perikanan juga ada yang turun, waktu akhir bulan kemarin turun. Seperti bantuan-bantuan alat tangkap gitu Pak. Satu kelompok itu kemarin saya nerima mesin 2 unit, bubu 400, terus sama jaring rampus 5, sama soner 1.</p>
2	<p>Model Kelembagaan Ekonomi</p>	<p>Bisa diceritakan mengenai pola kerja nelayan di Tanjung Pasir Pak?</p> <p>Kami kalau cuaca bagus akan melaut setiap harinya. Tapi jika cuaca lagi tidak bagus, ya kadang-kadang melaut kadang-kadang tidak. kalau melaut kadang kami juga kena sampah, dan itu menyebabkan jaring kami rusak. Kalau sudah rusak, tidak dapat apa-apa Pak. Pemenuhan</p>

		<p>kebutuhan alat tangkap kurang sekali disini. Kayak misalnya jaring rajungan, saya ceritakan sedikit, jaring rajungan itu tiap hari ngejaring, kalau alat tangkapnya udah rusak, otomatis gak dapet. Tapi kalau jaringnya baru dapatnya banyak. Sedangkan alat tangkap itu satu pis 45 ribu atau berapa gitu. Kadang-kadang kendalanya juga hilang. Antara teman saling ambil, pura-puranya salah ambil. Sebenarnya lumayan rajungan itu, apalagi sekarang harganya 50-60 ribu sekilo. Dapat 4 kilo, 5 kilo aja udah 200, 300 ribu dia dapat. Sekarang ini, ada yang disebut bosnya itu, tengkulaknya. Dia yang memenuhi kebutuhannya, bukan dari pemerintah. Seharusnya ada program pinjaman alat tangkap, misalnya sistem kredit. Kalau ada koperasinya misal kan, saya ambil 10 pis nih. Lunas, kasih lagi. Itu kan juga koperasi diuntungkan kan. 45 jual 50, sistem kredit kan. Jadi saling membantu gitu.</p> <p>Ada yang jaring rajungan, ada yang ke laut 5 kali sehari pulang, satu minggu pulang, ada juga yang tiap hari. Di sini gak ada nelayan besar, nelayan tradisional semua. Gak nyampe. Di sini, kalau nelayan jaring ya, paling sehari dia dapat 70 ribu, 80 ribu, kadang bisa 300 ribu. Tapi kalau kosong, kosong, jaringnya hilang, sama sekali gak ada. Ya udah, pinjem-pinjem. Yang jadi kendala di sini, itu adalah permodalan yang akhirnya ada bank-bank rentenir yang masuk. Itu yang saya sebenarnya kasihan melihatnya. 1 juta, dalam 1 bulan harus</p>
--	--	---

		<p>ngembaliin 1 juta 300, berarti kan orangnya pengen untung 300, 300 belum terlalu berat Pak. Ada yang lebih, yang sampai 50 persen ada. Di sini macem-macam pinjaman. Ada yang kredit berupa emas. Emas misalnya harga 500 ribu, bisa 1 juta. Jadi ya, kalau udah kena kejanginan itu, ya bagaimana mau berkembang. Untungnya dimakan sama mereka gitu kan. Jadi kerja untuk dia gitu. Ya kalau dia, cukup buat makan aja. Ada juga disebutnya bank Tuyul namanya. Tiap hari dia, apa, ngambilin cicilannya. Banyak, jadi ya satu orang itu bisa dua, tiga pinjaman.</p> <p>Contohnya kayak perahu-perahu nelayan jaring rajungan ya dimodalin sama bosnya. Bosnya yang nyediain fasilitas. Kalau dapat tangkapan, jualnya di Bossnya 50, di lain 60, gitu misalnya, soalnya kan udah dikasi fasilitas. Kenapa sih pemerintah selama ini gak melirik. Sebenarnya itu sangat membantu sekali. Kenapa si pemerintah gak mau seperti contoh seperti itu, padahal itu untung.</p> <p>Kalau di sini ada ini yang pembibitan bandeng, cuma kan kendalanya sirkulasi air yang gak jalan. Udah dicoba di sini, ternyata gak idup ikannya. Untuk budidaya keramba ikan pun tidak bisa berjalan.</p> <p>Untuk pengadaan modal nelayan selama ini, bersumber darimana Pak?</p> <p>Ada juga yang sistemnya berkelompok, misalnya 5 orang, minjem 10 jutaan, tapi kalau ada satu gak</p>
--	--	--

		<p>benar, ini tanggung jawab mereka semua. Swasta. Dia harus hadir, setiap hari Rebo pembayaran, mau kegiatan pa juga harus ditinggalin. Ada masalah di kelompok ini, ketuanya ini yang menyelesaikan. Program pemerintah itu kalah. Kalau program pemerintah mengandalkan si peminjem ini harus ke bank, jadi gak dipaksakan untuk bayar.</p> <p>kalau menurut kami itu salah satu sarana untuk mendukung perekonomian masyarakat di sini. Karena untuk permodalan kan sulit di sini. kalau ada KUR seperti itu mungkin bisa untuk menambah usaha. Tapi itu kan harus bekerjasama dengan bank.</p> <p>Organisasi nelayan selama ini berjalan seperti apa Pak?</p> <p>Nelayan kadang tidak mau berkelompok, ataupun dibentuk kelompok. Ada yang karena alasan masalah berat diuran, tidak mau pusing dengan urusan kelompok atau organisasi tadi Pak.</p> <p>Kalau untuk iuran kadang kelompok mewajibkan 1.000 atau 5.000, istilahnya untuk biaya kumpulan, silahturahmi.</p>
3	Ketahanan Ekonomi	<p>Kondisi ekonomi disini seperti apa Pak? Ada tidak pekerjaan sambilan ketika tidak melaut seperti berjualan ataupun persawahan?</p> <p>Kalau kayak pertanian di sini juga mati benar Pak. Memang jahat politik ini. Dulunya, sawah-sawah gak ada yang diuruk. Sekarang, sawah yang</p>

		<p>produktif saja diuruk untuk pembangun perumahan. Di Tanjung Pasir, sudah 360 hektar sawah diuruk. Kadang-kadang airnya gak jalan. Itu udah politik, sebenarnya jalan. Karena bagaimana caranya sawah ini gak ada airnya. Itu nanti buat perumahan mewah. Nanti tembus ke laut itu. Gak tau nanti masyarakat di sini mau ditaruh dimana gitu. Orang kecil itu makin tersingkir. Nah sekarang, semacam pembelian lahan juga asal, sawah-sawah orang beli 200, 300, dibeli 130 ribu. Kalau gak mau, diuruk sebelahnya, sebelahnya banjir. Di perkampungan gitu juga. Mau gak mau kan terpaksa dijual. Kadang-kadang, di depan udah dijual, di belakang udah dijual, dipagar.</p> <p>Untuk Pendidikan disini seperti apa Pak?</p> <p>Kalau orang tua memang banyak yang gak sekolah. Kalau anak-anak sekarang 80 persen masih sekolah. Rata-rata paling tinggi SMP. SMA jarang-jarang. Karena kalau SMA ke sana kan tetap ada biaya.</p>
--	--	--

DOKUMEN PENDUKUNG



Wawancara dengan Bapak Muchammad Nadjib, peneliti Senior LIPI pada Pusat Penelitian Ekonomi.



Wawancara dengan Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Peneliti tidak mendapatkan foto bersama dikarenakan jadwal beliau yang padat.



Wawancara bersama Laksamana Muda Dr. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD, Komandan Seskoal.

